



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA



# ***KEBIJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK***

*Disampaikan dalam rangka kegiatan  
Sosialisasi Pusat Data Nasional*

**Perwita Sari, S.ST, SE, M.Si**

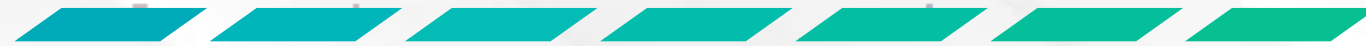
**Analisis Kebijakan Madya/Koordinator Perumusan  
Kebijakan SPBE pada Asisten Deputi Perumusan  
Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE,  
Kementerian PANRB**

Kamis, 8 Oktober 2020

# OUTLINE PAPARAN



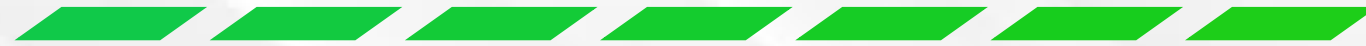
## 1. KEBIJAKAN UMUM SPBE



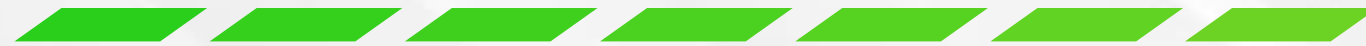
## 2. PERCEPATAN SPBE



## 3. EVALUASI SPBE



## 4. MANAJEMEN RISIKO SPBE



## 5. ARSITEKTUR SPBE





---

# KEBIJAKAN UMUM SPBE

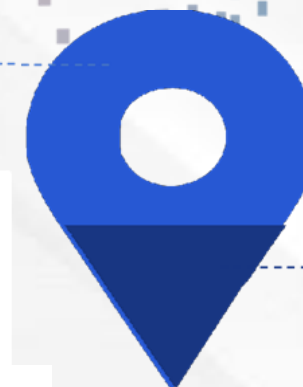
---

# KONDISI PENERAPAN SPBE



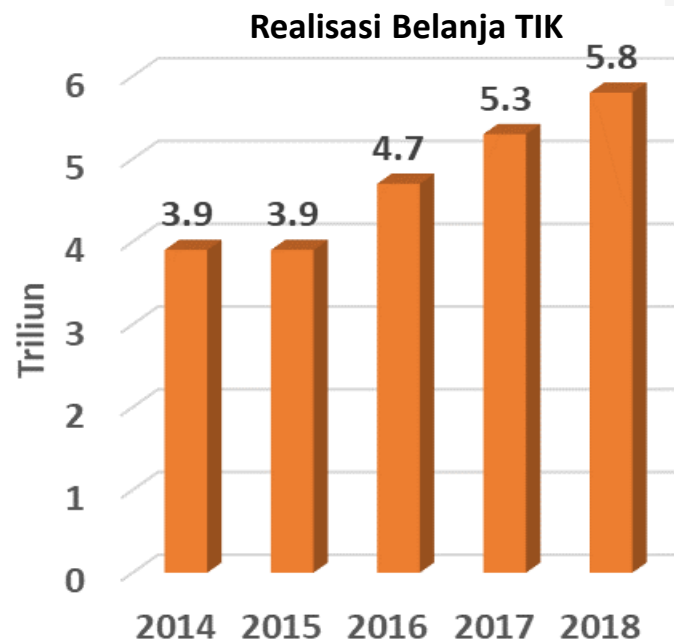
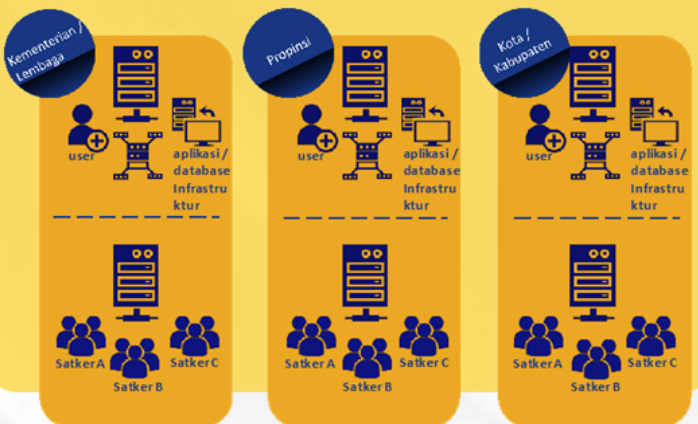
**65%**  
Aplikasi Umum

**35%**  
Aplikasi Khusus



Sumber: Wantiknas, 2016

- Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri
- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif



Sumber: Kementerian Keuangan

## Dampak Berantai

- Pemborosan anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%
- Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- Risiko keamanan informasi
- Validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya

# SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



## Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

## Tujuan SPBE



Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel



Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya



Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

## Cakupan Layanan SPBE



# KERANGKA PERPRES SPBE



## Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu

## Manajemen SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan



## Penyelenggara SPBE

- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

## Percepatan Penerapan SPBE

Implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi:

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan
- Integrasi data kepegawaian
- Integrasi kearsipan
- Integrasi pengaduan publik
- Pembangunan Pusat Data Nasional

# TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



## Menteri PANRB

- Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Mengoordinasikan seluruh program SPBE Nasional
- Mengoordinasikan proses bisnis pemerintahan
- Menetapkan aplikasi umum
- Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan

## Menteri PPN/ Bappenas

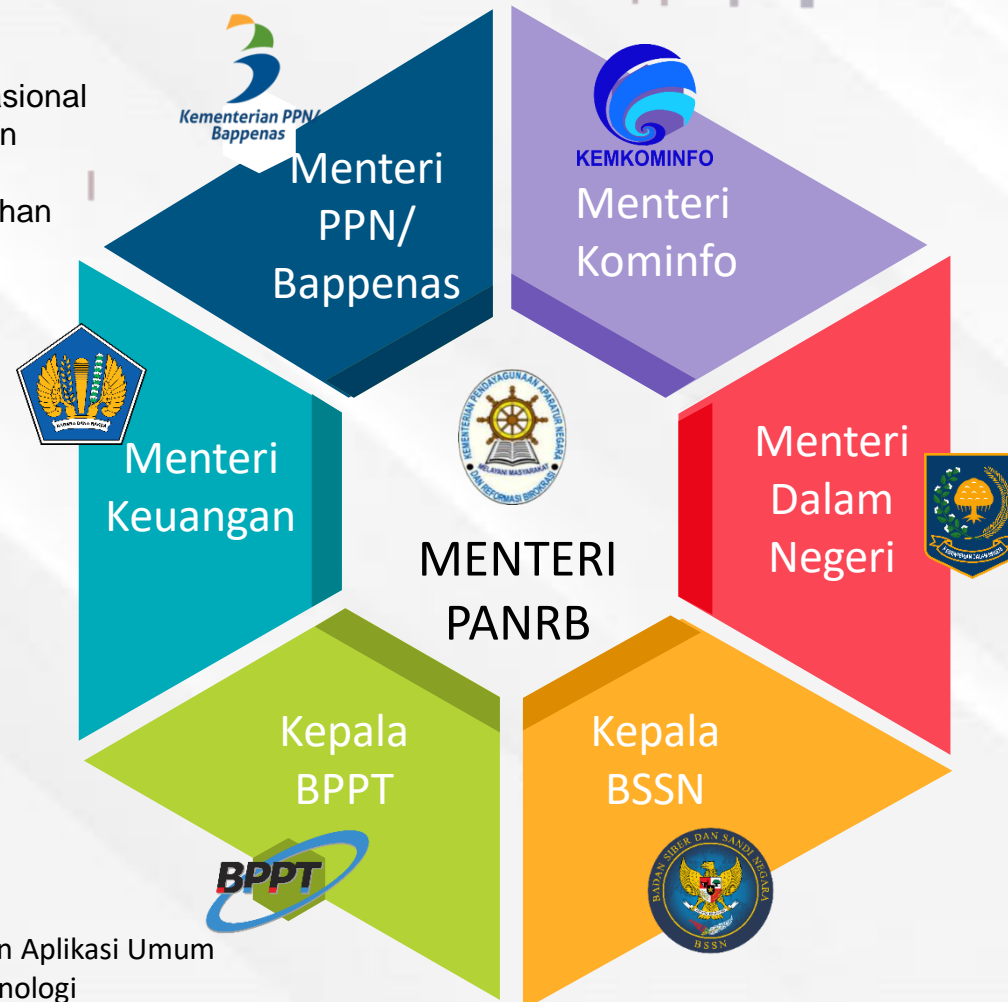
- Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L dan Nasional
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

## Menteri Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional

## Kepala BPPT

- Melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum
- Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi



## Menteri Kominfo

- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi
- Mengoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK
- Kebijakan umum audit TIK
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan

## Menteri Dalam Negeri

- Mengoordinasikan proses bisnis Pemda
- Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda

## Kepala BSSN

- Melaksanakan pengamanan SPBE
- Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
- Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE



---

# PERCEPATAN SPBE

---



# PERCEPATAN SPBE



## APLIKASI UMUM



- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, monev
- Target: Selesai Tahun 2023

Koordinator:  
Kementerian  
PPN/Bappenas

## APLIKASI UMUM



- Integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:  
Kementerian PANRB

## APLIKASI UMUM



- Integrasi layanan kearsipan dinamis
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:  
Kementerian PANRB

## APLIKASI UMUM



- Integrasi pengaduan pelayanan publik
- Target: Selesai Tahun 2020

Koordinator:  
Kementerian PANRB

## INFRASTRUKTUR TIK



- Pusat Data Nasional
- Jaringan Intra-Pemerintah
- Target: Selesai Tahun 2022

Koordinator:  
Kementerian Kominfo

*Aplikasi Umum akan ditetapkan oleh Menteri PANRB dan mencakup persyaratan proses bisnis, persyaratan data, persyaratan teknologi, dan persyaratan keamanan.*

# RENCANA LAUNCHING APLIKASI UMUM



- Aplikasi Umum yang siap untuk diluncurkan:
  1. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD)
  2. Aplikasi Umum Bidang Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N LAPOR!)
- Menteri PANRB akan meluncurkan aplikasi umum tersebut pada akhir Oktober 2020
- Penyelesaian aplikasi umum bidang kepegawaian akan dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
- Kesiapan Pusat Data Nasional sangat diperlukan untuk menjalankan aplikasi umum yang akan ditetapkan



---

# EVALUASI SPBE

---

# INDEKS SPBE NASIONAL



## HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2018 DAN 2019

Deskripsi	Indeks SPBE 2018	Indeks SPBE 2019	Jumlah Predikat "Baik" ke atas	Jumlah Predikat di bawah "Baik"
Penerapan SPBE Nasional	1,98	2,18	184 IP (31,51%)	400 IP (68,49%)
Penerapan SPBE Instansi Pusat (Kementerian/LPNK/Lembaga Negara)	2,80	2,97	53 IP (73,61%)	19 IP (26,39%)
Penerapan SPBE Pemda*	1,87	2,07	131 IP (25,59%)	381 IP (74,41%)

\*Catatan: 30 Pemda belum dievaluasi

Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di K/L/D dilaksanakan secara sendiri-sendiri (*silo*) dan belum dilakukan kolaborasi/integrasi antar K/L/D.

# LATAR BELAKANG REVISI PEDOMAN EVALUASI SPBE



## LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



### PERPRES 95/2018



### PERMENPANRB 5/2018

Pedoman **Evaluasi SPBE** digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE untuk **mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

### REVISI TERHADAP PERMENPANRB 5/2018

PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 terbit lebih dulu (9 bulan 11 hari) sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit.

Beberapa **amanat** Perpres 95 Tahun 2018 yang **belum terakomodasi** dalam PermenPANRB No. 5 Tahun 2018, antara lain:

- Arsitektur SPBE (Pasal 6–12)
- Peta Rencana SPBE (Pasal 13–19)
- Jaringan Intra Pemerintah (Pasal 32)
- Sistem Penghubung Layanan (Pasal 33)
- Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34–39)
- Keamanan SPBE (Pasal 40–41)
- Manajemen SPBE: Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, Manajemen SDM SPBE, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan (Pasal 46–54)
- Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan (Pasal 55–58)



# STRUKTUR PENILAIAN



PERMENPAN 5/2018

DOMAIN (3)  
ASPEK (7)  
INDIKATOR (35)

PEDOMAN REVISI

DOMAIN (4)  
ASPEK (8)  
INDIKATOR (47)

Indeks

SPBE

Domain

Kebijakan Internal

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Aspek

Kebijakan Tata Kelola SPBE

Kebijakan Layanan SPBE

Kelembagaan/ Penyelenggara SPBE

Perencanaan dan Strategi

TIK

Penerapan Manajemen

Audit TIK

Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Publik

Indikator

7 | 10

10 | -

2 | 2

2 | 4

3 | 4

- | 8

- | 3

7 | 10

4 | 6

Semula

Menjadi

# METODOLOGI EVALUASI

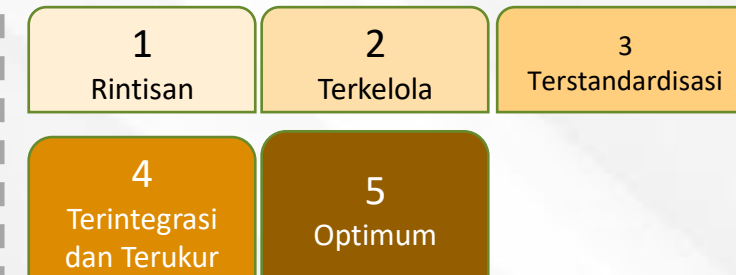


## METODOLOGI EVALUASI SEBELUMNYA

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan SPBE



### Tingkat Kematangan Kebijakan dan Tata Kelola



### Tingkat Kematangan Layanan



# METODOLOGI EVALUASI

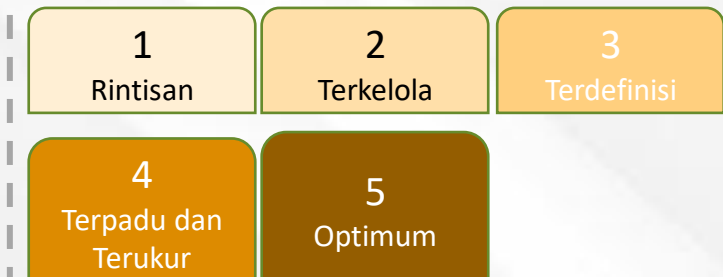


## METODOLOGI EVALUASI BARU

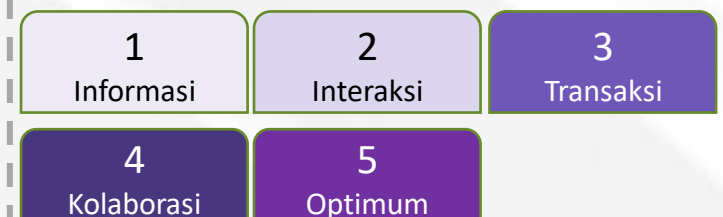
Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan SPBE



### Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen



### Tingkat Kematangan Layanan

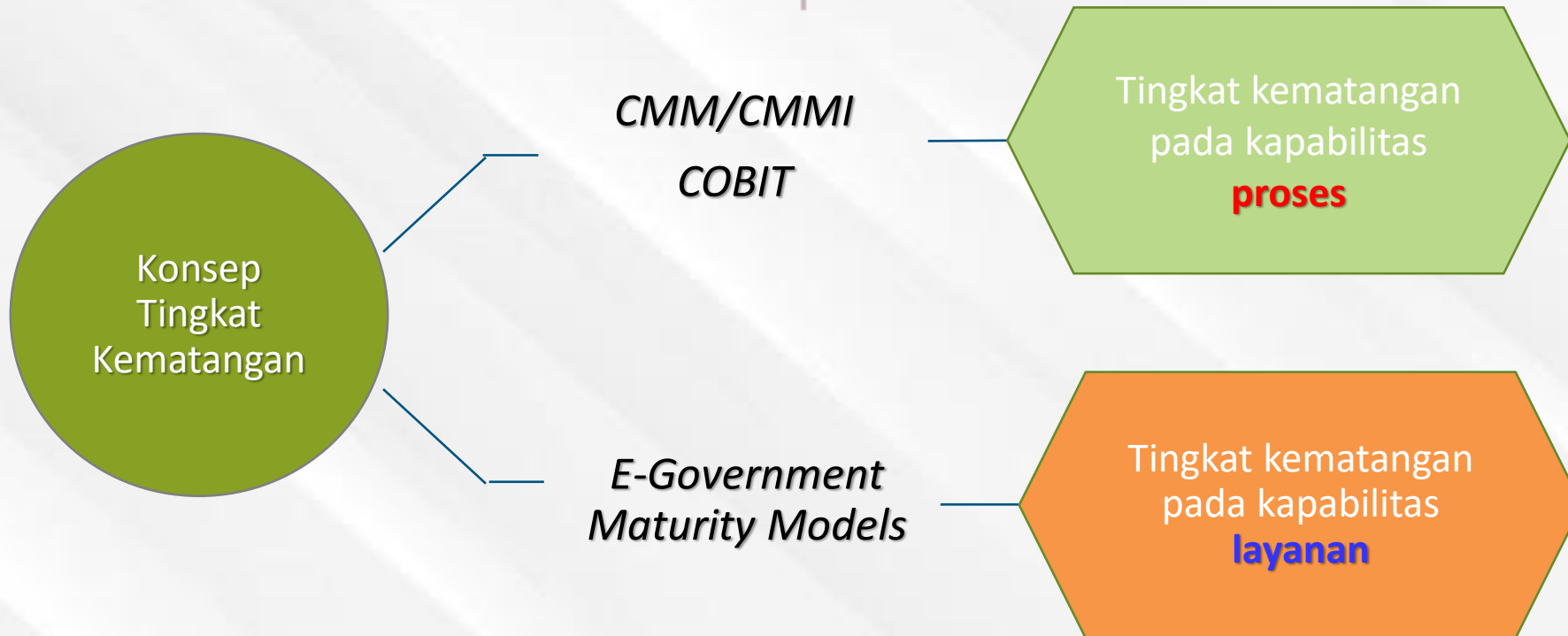




# KONSEP TINGKAT KEMATANGAN



*Pedoman evaluasi baru masih menggunakan konsep penilaian tingkat kematangan yang sama*



Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN



## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES

### 1. Rintisan

- Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

### 2. Terkelola

- Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

### 3. Terdefinisi

- Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.

### 4. Terpadu dan Terukur

- Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.

### 5. Optimum

- Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.
- Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi.

# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN



## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS LAYANAN

### 1. Informasi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.

### 2. Interaksi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

### 3. Transaksi

- Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

### 4. Kolaborasi

- Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.

### 5. Optimum

- Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Revisi	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Sebelumnya
<b>Domain 1</b>	<b>Kebijakan Internal SPBE</b>	
<b>Aspek 1</b>	<b><i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i></b>	
<b>Indikator 1</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 2</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 3</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	X
<b>Indikator 4</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
<b>Indikator 5</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
<b>Indikator 6</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Indikator 7</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Indikator 8</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	X
<b>Indikator 9</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	X
<b>Indikator 10</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>	
<b>Aspek 2</b>	<b>Perencanaan Strategis SPBE</b>	X
<b>Indikator 11</b>	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 12</b>	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 13</b>	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Anggaran dan Belanja TIK
<b>Indikator 14</b>	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
<b>Aspek 3</b>	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	
<b>Indikator 15</b>	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Integrasi Sistem Aplikasi
<b>Indikator 16</b>	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Pengoperasian Pusat Data
<b>Indikator 17</b>	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Indikator 18</b>	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Aspek 4</b>	<b>Penyelenggara SPBE</b>	
<b>Indikator 19</b>	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Tim Pengarah SPBE
<b>Indikator 20</b>	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	X

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
<b>Domain 3</b>	<b>Manajemen SPBE</b>	
<b>Aspek 5</b>	<b>Penerapan Manajemen SPBE</b>	
<b>Indikator 21</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	X
<b>Indikator 22</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	X
<b>Indikator 23</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	X
<b>Indikator 24</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	X
<b>Indikator 25</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia	X
<b>Indikator 26</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	X
<b>Indikator 27</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	X
<b>Indikator 28</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	X
<b>Aspek 6</b>	<b>Audit TIK</b>	
<b>Indikator 29</b>	Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE	X
<b>Indikator 30</b>	Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	X
<b>Indikator 31</b>	Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE	X
<b>Domain 4</b>	<b>Layanan SPBE</b>	
<b>Aspek 7</b>	<b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	
<b>Indikator 32</b>	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	Layanan Manajemen Perencanaan
<b>Indikator 33</b>	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	Layanan Manajemen Penganggaran

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan	Layanan Naskah Dinas
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	X
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	Layanan Whistle Blowing System
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	X
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	Layanan Manajemen Kinerja
<b>Aspek 8</b>	<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>	
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	X
Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1

*“Masih terdapat 25 indikator yang sama dengan indikator penilaian SPBE sebelumnya”*

# KRITERIA INDIKATOR 16



Domain 2	Tata Kelola SPBE	Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data		
Tingkat	Kriteria		
1	Layanan Pusat Data <b>belum atau telah tersedia</b> digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data <b>telah digunakan oleh sebagian</b> unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data <b>telah digunakan oleh seluruh</b> unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, <b>terdapat prosedur pengoperasian baku</b> Layanan Pusat Data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan <b>terdapat interkoneksi</b> Layanan Pusat Data <b>dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain</b> dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah direviu dan dievaluasi secara periodik</b> .		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta <b>hasil reviu dan evaluasi</b> penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <b>telah ditindaklanjuti</b> dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.		



# PROSES PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



## PEMANTAUAN

01

### TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02

### TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;

03

### TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek; dan,
- Nilai Indikator.

## EVALUASI

01

### TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02

### TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;
- Penilaian interviu;
- Penilaian visitasi (jika diperlukan).

03

### TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek;
- Nilai Indikator; dan,
- Rekomendasi perbaikan.



---

# MANAJEMEN RISIKO SPBE

---

# MANAJEMEN RISIKO SPBE



## Manajemen Risiko SPBE

adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.



**Risiko Positif SPBE** adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan **meningkatkan** peluang keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dalam penerapan SPBE

**Risiko Negatif SPBE** adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan **menurunkan** peluang keberhasilan terhadap pencapaian tujuan dalam penerapan SPBE

# TUJUAN DAN MANFAAT



## Tujuan

- Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan
- Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan
- Meningkatkan kepatuhan peraturan
- Menciptakan budaya sadar risiko



## Manfaat

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu
- Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemerintah
- Meningkatkan kinerja pemerintah

# TUJUAN KERANGKA KERJA



**Tujuan** untuk membantu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Penggunaan** Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat **mengadopsi** secara langsung atau **memodifikasi** kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE ini sesuai dengan konteks di lingkungannya masing-masing

# CAKUPAN KERANGKA KERJA



## Prinsip Utama

menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE

## Karakteristik Prinsip Utama

- Terintegrasi
- Terstruktur dan Komprehensif
- Dapat disesuaikan
- Inklusif
- Dinamis
- Informasi tersedia dan terbaik
- Faktor manusia dan budaya
- Perbaikan berkelanjutan



**Kepemimpinan dan Komitmen** menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE.

## Proses Dalam Penerapan Kerangka Kerja

- Integrasi
- Desain
- Implementasi
- Pemantauan dan Evaluasi
- Perbaikan

# CAKUPAN KERANGKA KERJA (2)



## Tata Kelola Manajemen Risiko

mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE, melalui:

- Struktur Manajemen Risiko
- Budaya sadar risiko SPBE

**Proses Manajemen Risiko** rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian proses kegiatan organisasi untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek.

- Proses ini terdiri atas:**
1. Komunikasi dan konsultasi
  2. Penetapan risiko SPBE
  3. Penilaian risiko SPBE
  4. Penanganan risiko SPBE
  5. Pemantauan dan Evaluasi
  6. Pencatatan dan Pelaporan

## CAKUPAN KERANGKA KERJA (2)



- Penerapan Manajemen Risiko dalam **Pusat Data Nasional** diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari penerapan SPBE di Pusat Data Nasional.
- Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE berfungsi sebagai pemandu penerapan Manajemen Risiko SPBE yang diintegrasikan dengan proses kegiatan pemerintahan.
- Tata kelola perlu dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE yang disesuaikan dengan konteks organisasi dan membangun budaya sadar risiko yang melibatkan semua pemangku kepentingan.





---

# ARSITEKTUR SPBE

---

# ARSITEKTUR SPBE



## ARSITEKTUR SPBE

### Definisi:

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

## SUBSTANSI ARSITEKTUR SPBE

- Model Referensi
- Domain Arsitektur

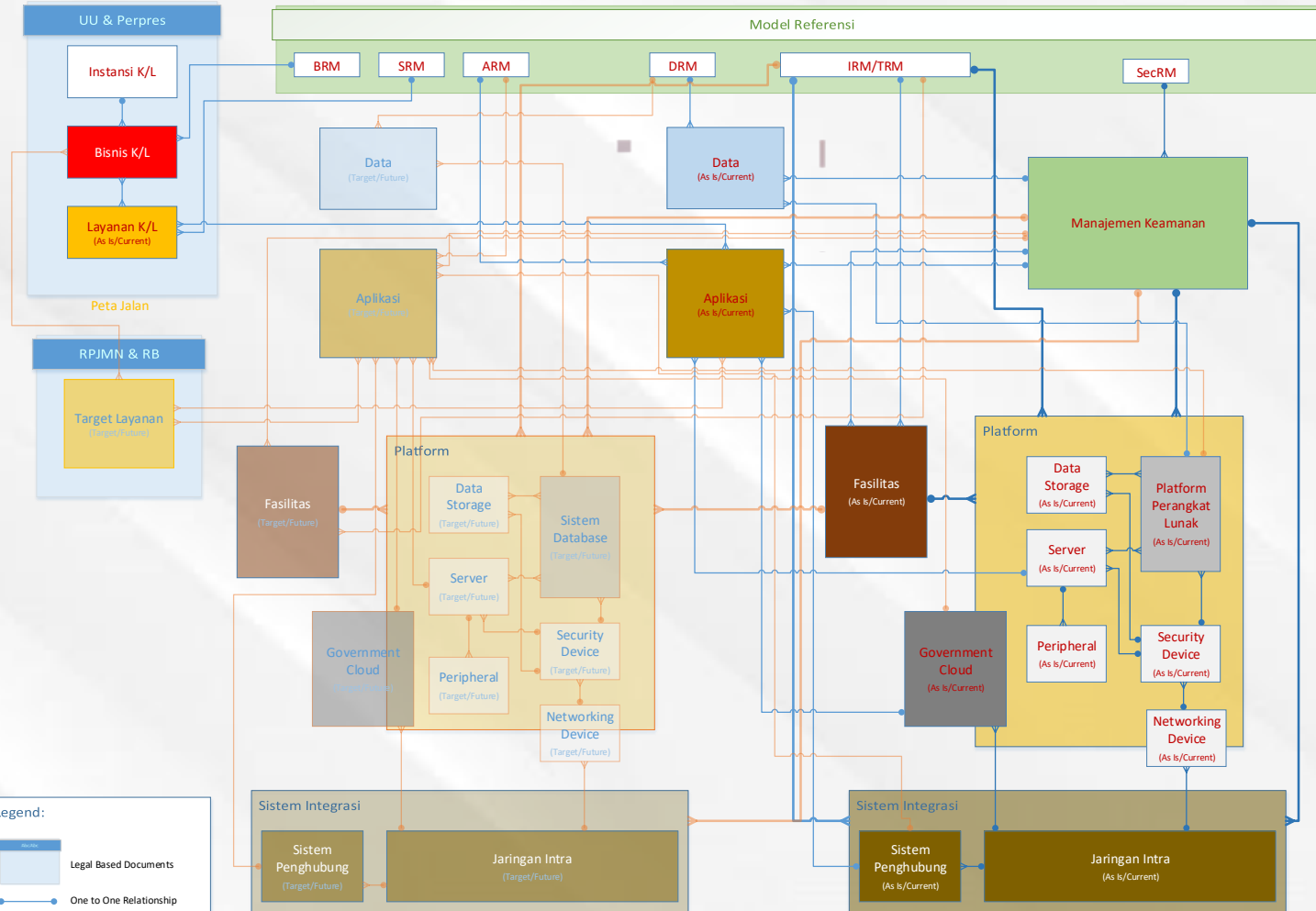
## KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

- Penyusunan konsep awal model referensi Arsitektur
- Penyusunan meta item

# ARSITEKTUR SPBE

Model Referensi Arsitektur

Model Meta Item Arsitektur



Meta Model Arsitektur SPBE Nasional 2020 - 2024

## Model Referensi Bisnis

menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

## Model Referensi Layanan

menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan baik secara kelembagaan ataupun lintas kelembagaan

### Model Referensi Data

menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang digunakan dalam menghasilkan layanan baik pada sektor tertentu ataupun berbagi pakai lintas sektor

### Model Referensi Aplikasi

menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada bisnis tertentu

### Model Referensi Infrastruktur

menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu

## Model Referensi Keamanan

menguraikan jenis manajemen keamanan yang diterapkan pada domain data, aplikasi, dan infrastruktur dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

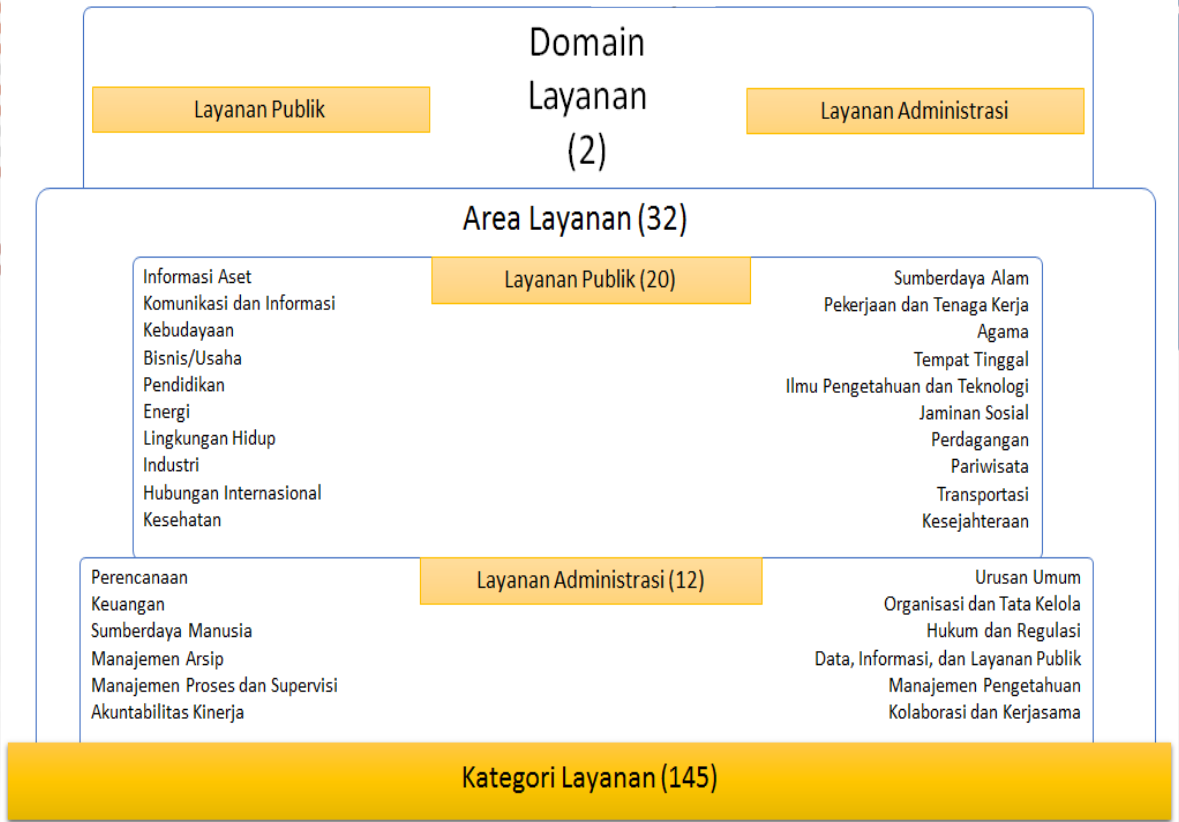
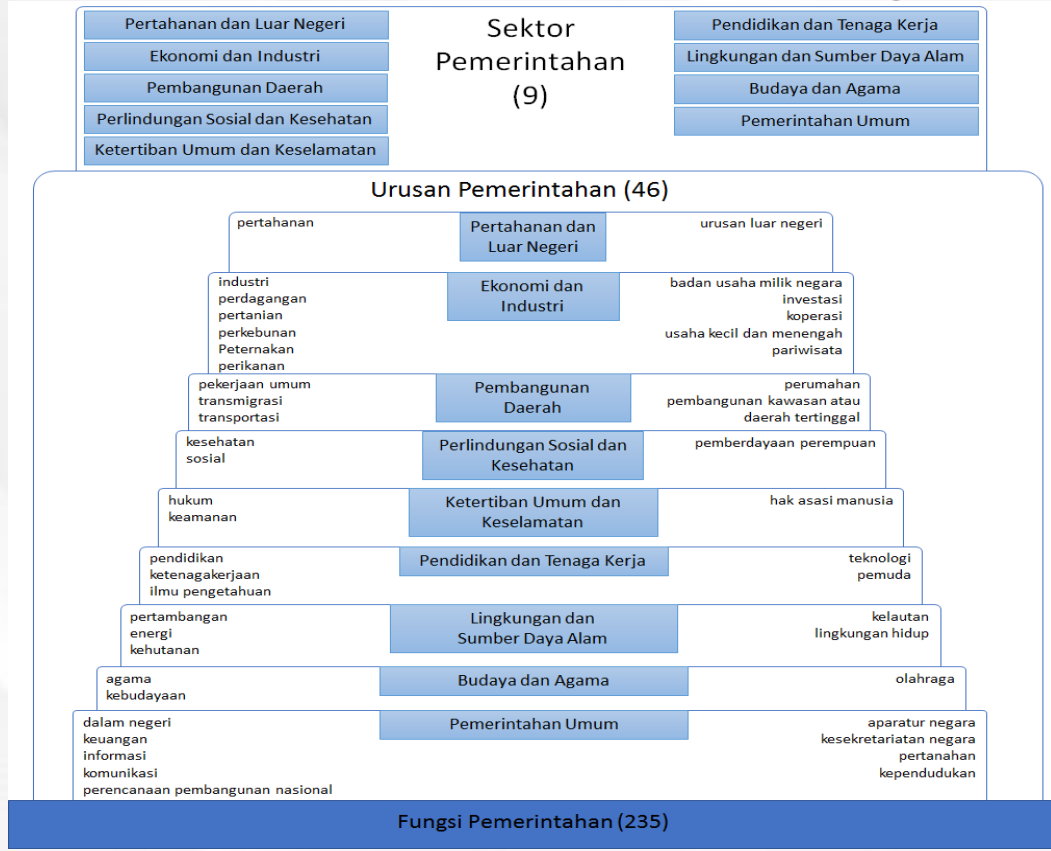
Domain Arsitektur

- Arsitektur Bisnis
- Arsitektur Data
- Arsitektur Layanan
- Arsitektur Infrastruktur
- Arsitektur Aplikasi
- Arsitektur Keamanan

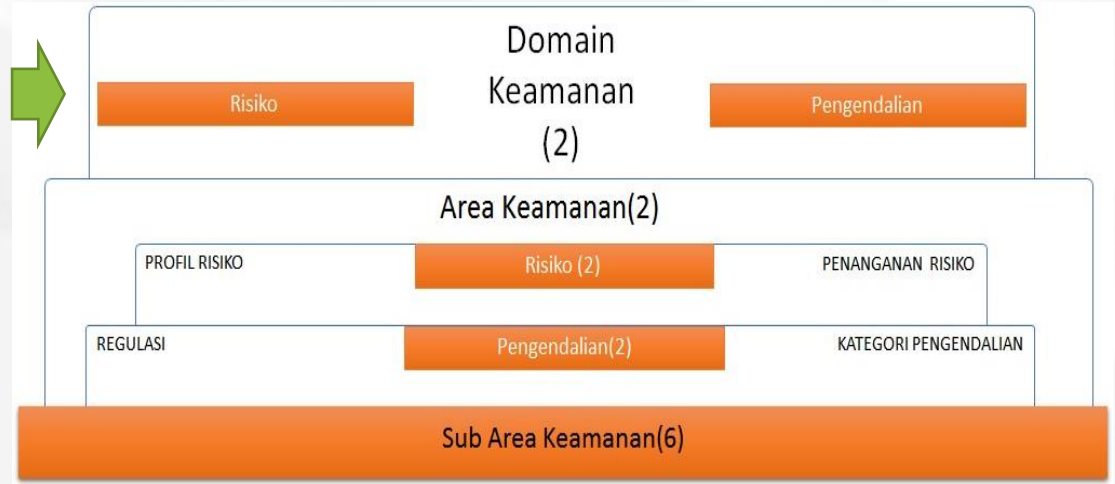
# CONTOH MODEL REFERENSI

## Model Referensi Arsitektur Bisnis

## Model Referensi Arsitektur Layanan

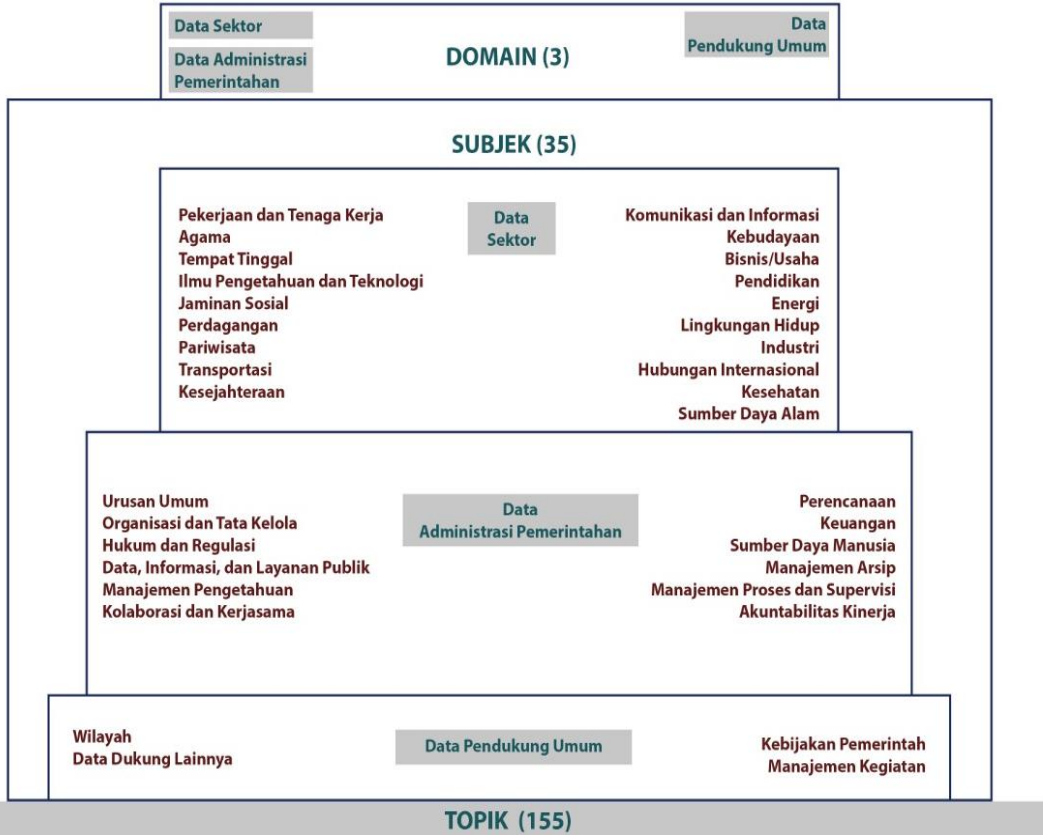


## Model Referensi Arsitektur Keamanan

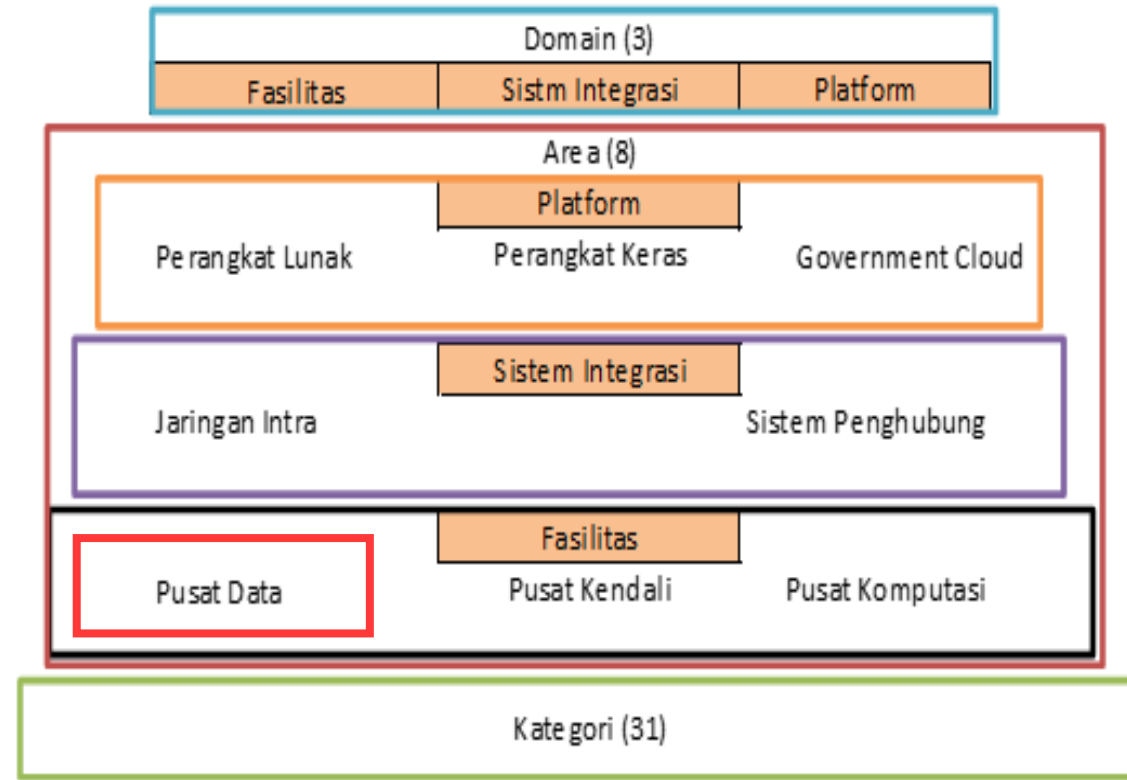


# CONTOH MODEL REFERENSI

Model Referensi  
Arsitektur Data



Model Referensi  
Arsitektur  
Infrastruktur



Model Referensi  
Arsitektur  
Aplikasi





KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA



*Thank You*  
**TERIMA KASIH**